

# Sinergi Bilateral Indonesia dan Malaysia dalam Menanggapi Kampanye Hitam Uni Eropa terhadap Minyak Kelapa Sawit

Nazwa Fitriani<sup>1</sup>, Ikomatussuniah<sup>2</sup>

Fakultas Hukum

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [1111230438@untirta.ac.id](mailto:1111230438@untirta.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, serta pemangku kepentingan industri kelapa sawit dari kedua negara, dalam merespon hambatan perdagangan minyak sawit yang diinisiasi oleh Uni Eropa. Dalam konteks globalisasi, pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk bagi Indonesia dan Malaysia yang merupakan eksportir utama minyak kelapa sawit. Isu-isu seperti kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia telah menjadi bahan kampanye negatif, culminating dalam penerapan Undang-Undang Deforestasi oleh Uni Eropa per 16 Mei 2023. Penelitian ini mengadopsi metode studi pustaka, menelaah sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan, baik yang diperoleh secara online maupun offline, untuk memahami strategi yang diimplementasikan oleh kedua negara dalam mengatasi isu tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai langkah-langkah bersama yang efektif dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional, khususnya terkait dengan kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit.

**Kata Kunci:** Minyak kelapa sawit, Kampanye hitam, Indonesia, Malaysia, Uni Eropa, Kerja sama bilateral.

*Abstract*



*This research aims to analyze the strategic steps taken by the governments of Indonesia and Malaysia, as well as stakeholders in the palm oil industry from both countries, in responding to trade barriers on palm oil initiated by the European Union. In the context of globalization, economic growth through international trade often faces various barriers, including for Indonesia and Malaysia, which are major exporters of palm oil. Issues such as environmental damage and human rights violations have been the subject of negative campaigns, culminating in the implementation of the Deforestation Act by the European Union on May 16, 2023. This study adopts the literature review method, examining relevant sources such as books, journals, and articles, both online and offline, to understand the strategies implemented by both countries in addressing these issues. The research findings are expected to provide insights into effective joint measures in facing international trade challenges, especially related to the negative campaign against palm oil products.*

*Summary of the research, including background, methodology, main results, and conclusion.*

**Keywords:** *Palm oil, Black campaign, Indonesia, Malaysia, European Union, Bilateral cooperation.*



## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Di era saat ini, globalisasi telah lama menjadi kekuatan yang dominan, namun pengaruhnya tetap tidak berubah, khususnya dalam bidang perdagangan. Globalisasi telah memperluas cakrawala perdagangan internasional, yang mencakup kumpulan berbagai negara di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh batas teritorial suatu negara. Kegiatan ekspor-impor yang terjadi di berbagai negara merupakan manifestasi dari pertumbuhan globalisasi, sering kali karena kurangnya kemampuan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Salah satu contoh kegiatan ekspor-impor adalah negara Indonesia dan Malaysia yang menjadi penghasil utama minyak sawit, mengekspor minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil* atau CPO) ke banyak negara di seluruh dunia. Indonesia, dengan salah satu perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, bersama Malaysia, berdiri sebagai produsen dan pengekspor utama CPO. Kedudukan ini dikarenakan tingginya permintaan minyak kelapa sawit di dunia, dengan Uni Eropa menggunakan minyak nabati sebagai bahan utama dalam produksi energi terbarukan. Peningkatan konsumsi minyak sawit secara signifikan telah memberikan dampak yang besar terhadap industri kelapa sawit global. Dalam beberapa dekade terakhir, industri ini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu pemain kunci di pasar minyak nabati internasional. Saat ini, minyak kelapa sawit mendominasi pasar dengan menyumbang sekitar 30% dari total, disusul oleh minyak kedelai dengan 29%, minyak biji rape 14%, minyak bunga matahari 8%, dan minyak lainnya mencakup 19%. (Gunawan, 2018)





Beberapa contoh yang menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit adalah minyak nabati paling produktif.

Sumber: Laporan Komisi Eropa Tahun 2018

Dalam naskah ini, penulis akan terus menggarisbawahi pentingnya minyak kelapa sawit bagi Indonesia dan Malaysia, yang berstatus sebagai produsen dan eksportir utama di kawasan Asia Tenggara. Sejak 2006, Indonesia telah menempati posisi sebagai negara dengan produksi minyak sawit terbanyak di dunia, mencatatkan produksi sebesar 36,59 juta ton pada tahun 2018 (BPS, 2018). Pada Tahun 2016, Malaysia memiliki pangsa sebesar 32% (Jan Horas V. Purba, 2017). Demikian halnya dalam pasar minyak nabati global, minyak sawit juga berhasil mengungguli minyak kedelai (*soybean oil*) sejak 2004. (Jan Horas V. Purba, 2017). Pada 2004, total produksi CPO mencapai 33,6 juta ton, sedangkan minyak kedelai adalah 32,4 juta ton. Pada 2016, *share* produksi CPO dunia mencapai 40% dari total nabati utama dunia, sedangkan minyak kedelai memiliki pangsa sebesar 33,18% (Jan Horas V. Purba, 2017). Data Oil World menunjukkan bahwa produksi minyak sawit dunia tahun 2022



mencapai 78.3 juta ton, dan sekitar 59 persen dihasilkan oleh Indonesia. Artinya minyak sawit menjadi minyak nabati yang penting di dunia dan konsumen global bergantung dengan minyak sawit Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam pasar minyak sawit global. (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, 2023)

Kedua negara bekerja sama melalui *The Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) untuk memperkuat kerjasama di sektor minyak kelapa sawit dan berdasarkan hasil serah terima jabatan ketua pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) yang diselenggarakan pada 26 Februari 2021 secara virtual, Indonesia saat ini ditunjuk menjadi Ketua CPOPC pada tahun 2021. Minyak kelapa sawit, yang digunakan dalam berbagai produk mulai dari minyak goreng hingga farmasi, adalah komoditas berharga. Bahkan ketika roda ekonomi dunia berhenti sementara saat pandemi *Covid-19*, harga minyak sawit global justru mengalami kenaikan secara bertahap sepanjang tahun. Salah satunya dikarenakan permintaan untuk minyak sawit meningkat karena adopsi program B30 di Indonesia, peningkatan produksi produk oleokimia dan produk higienis lainnya seperti sabun, deterjen, dan hand sanitizer, serta kebutuhan akan minyak nabati pengganti yang terganggu produksinya akibat pandemi dan perubahan iklim. Akibatnya, harga minyak sawit mencatat pertumbuhan positif menjadi USD 706 per ton pada tahun tersebut (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, 2023). Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia pernah juga mencakup kesepakatan tentang ekspor limbah sawit Indonesia ke Malaysia sejumlah 2.000 ton per bulan selama dua tahun, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan minyak kelapa sawit antar kedua negara. Penandatanganan kesepakatan (MoU) dilakukan antara PT Alam Duta Mandiri dan Dendro Integrasi SDN Bhd pada hari Selasa 16 Februari 2021.



Kampanye hitam Uni Eropa terhadap minyak sawit mengacu pada upaya Uni Eropa untuk membatasi atau mengurangi penggunaan minyak sawit dalam produk-produk mereka karena kekhawatiran akan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan produksi kelapa sawit. Uni Eropa telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan minyak sawit, termasuk kebijakan terkait pembatasan penggunaan biodiesel dari minyak sawit. Salah satunya adalah Pengenalan *Renewable Energy Directive (RED)* oleh Uni Eropa bertujuan untuk mengurangi emisi karbon global, sesuai dengan komitmen mereka terhadap Protokol Kyoto. Salah satu maksud dari penetapan target penggunaan biofuel bagi negara-negara anggota Uni Eropa adalah untuk mengurangi ketergantungan pada konsumsi dan impor bahan bakar fosil, dengan syarat bahwa biofuel harus mematuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan dalam Directive 2009/28/EC. Meskipun tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan dan mengurangi emisi, akan tetapi penerapan *RED* juga dianggap sebagai bentuk hambatan baru yang diciptakan oleh Uni Eropa untuk melindungi industri biofuel domestik dari persaingan produk dari luar. Ini terutama karena Uni Eropa adalah salah satu produsen utama biodiesel, sehingga ada ketegangan dalam persaingan dagang antara produsen biofuel. Akibatnya, upaya Uni Eropa dalam menerapkan *RED* sering kali dilihat sebagai *green protectionism*, di mana kriteria keberlanjutan dianggap sebagai cara untuk melindungi industri biofuel domestik dari persaingan dengan produk luar. (Dewi, 2012)

Salah satu argumen yang digunakan dalam kampanye hitam ini adalah bahwa produksi minyak sawit seringkali terkait dengan deforestasi, kerusakan habitat satwa liar, serta pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara produsen. Uni Eropa berupaya untuk mendorong penggunaan alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kampanye ini telah menimbulkan kontroversi di antara produsen minyak sawit, terutama negara-negara produsen utama seperti Indonesia dan Malaysia. Mereka berpendapat bahwa kampanye hitam tersebut tidak



mempertimbangkan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam produksi kelapa sawit berkelanjutan, dan bahwa larangan atau pembatasan penggunaan minyak sawit dapat merugikan ekonomi mereka.

## 1.2 Permasalahan

Larangan atau pembatasan penggunaan minyak sawit oleh Uni Eropa dapat berdampak negatif pada banyak aspek, salah satunya adalah ekonomi Indonesia dan Malaysia, karena kedua negara adalah produsen utama minyak sawit di dunia. Ini dapat mengakibatkan penurunan ekspor minyak sawit dan pendapatan negara yang signifikan dari industri ini. Selain itu kampanye hitam (*Black Campaign*) ini juga berdampak pada timbulnya kemungkinan atau ancaman kehilangan pasar karena kampanye ini dapat menciptakan ketidakpastian pasar dan mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap produk-produk yang berasal dari minyak sawit. Hal ini tentu dapat mengakibatkan penurunan permintaan global untuk minyak sawit Indonesia dan Malaysia. Terakhir, tindakan Uni Eropa terhadap minyak sawit dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan diplomatik antara Uni Eropa, Indonesia, dan Malaysia. Hal ini dapat mempersulit negosiasi dagang dan kerja sama antar negara-negara tersebut dalam berbagai bidang.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak kampanye hitam Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit terhadap ekonomi dan lingkungan, dengan fokus pada respon diplomatik dari Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang implikasi ekonomi dari kebijakan tersebut bagi produsen minyak kelapa sawit dan negara-negara penghasilnya, serta dampaknya terhadap lingkungan, termasuk lahan gambut dan kerusakan hutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi potensi solusi keberlanjutan yang dapat diadopsi oleh industri kelapa sawit dan pemerintah untuk mengatasi tantangan ekonomi dan lingkungan yang dihadapi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan



wawasan yang lebih komprehensif tentang kompleksitas hubungan antara perdagangan internasional, kebijakan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup tiga aspek utama: pertama, analisis dampak kampanye hitam Uni Eropa terhadap pasar minyak kelapa sawit, termasuk evaluasi terhadap ekonomi dan industri di Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Kedua, penelitian ini akan memeriksa tanggapan diplomatik dari pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa terhadap kebijakan tersebut, dengan fokus pada upaya diplomasi dan perundingan. Ketiga, ruang lingkup penelitian ini juga mencakup evaluasi dampak lingkungan dari produksi minyak kelapa sawit, termasuk efek terhadap lahan gambut, kerusakan hutan, dan keanekaragaman hayati. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri kelapa sawit dan kebijakan lingkungan terkait, serta potensi solusi keberlanjutan yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut.

### **2. Tinjauan Pustaka**

#### **2.1 Teori Kerja Sama Bilateral**

Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen utama minyak kelapa sawit, memiliki ketergantungan ekonomi yang signifikan pada Uni Eropa sebagai salah satu pasar utama mereka. Ketika Uni Eropa memulai kampanye hitam terhadap minyak kelapa sawit dengan pembatasan penggunaan produk-produk yang terkait dengan minyak tersebut, hal ini memberikan dampak langsung pada ekonomi Indonesia dan Malaysia karena membatasi akses pasar yang penting bagi mereka. Penerapan kebijakan-kebijakan yang mengurangi permintaan terhadap minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan dagang antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, teori kegantungan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana ketergantungan ekonomi Indonesia dan Malaysia pada pasar Uni Eropa





mempengaruhi respons mereka terhadap kampanye hitam tersebut. Ini dapat mencakup upaya-upaya mereka untuk mencari pasar alternatif, mengurangi ketergantungan mereka pada Uni Eropa, atau bahkan meningkatkan kerjasama bilateral dalam menanggapi tekanan eksternal tersebut.

## **2. Metodologi**

### **2.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa studi literatur. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tanggapan Indonesia dan Malaysia terhadap kampanye hitam Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit melalui tinjauan literatur dan data sekunder yang komprehensif.

### **2.2 Identifikasi Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur akademis, laporan pemerintah, artikel berita, dan publikasi industri terkait dengan peran minyak kelapa sawit dalam ekonomi Indonesia dan Malaysia serta tanggapan mereka terhadap kampanye Uni Eropa. Data juga diperoleh dari dokumen kebijakan, pernyataan resmi, dan laporan industri yang relevan.

### **2.3 Seleksi dan Evaluasi Literatur**

Pemilihan literatur dilakukan melalui pencarian daring di basis data akademis seperti Google Scholar, PubMed, dan ProQuest, serta situs web resmi pemerintah dan organisasi industri terkait. Literatur yang dipilih harus relevan dengan topik penelitian dan memiliki metodologi yang valid. Evaluasi literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas, otoritas, dan kebaruan sumber tersebut.

### **2.4 Analisis Data**

Data dari literatur dianalisis menggunakan pendekatan



analisis konten. Informasi yang relevan diekstraksi dari setiap sumber literatur, termasuk temuan, argumentasi, dan rekomendasi yang berkaitan dengan tanggapan Indonesia dan Malaysia terhadap kampanye hitam Uni Eropa. Data dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu seperti kerja sama bilateral, diplomasi, diversifikasi pasar, inovasi produk, dan standar keberlanjutan.

## 2.5 Interpretasi Temuan

Temuan dari analisis literatur diinterpretasikan untuk memahami tanggapan Indonesia dan Malaysia secara holistik terhadap kampanye hitam Uni Eropa. Peneliti memperhatikan kesamaan, perbedaan, dan pola yang muncul dalam tanggapan kedua negara serta implikasinya dalam konteks ekonomi dan industri kelapa sawit. Interpretasi temuan ini digunakan untuk menyusun hasil penelitian yang komprehensif dan informatif.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1 Deskripsi Hasil Presentasi Temuan Penelitian

Hasil presentasi dari temuan penelitian ini adalah kampanye hitam ini sudah hadir sejak tahun 1980-an. Isu ini dimulai dengan anggapan kadar kolesterol yang tinggi terkandung di dalam kelapa sawit dan tentu ini berbahaya bagi kesehatan. Kemudian meningkat ketika persoalan global warming mulai digencarkan pada tahun 1999-2000. Saat itu isu miring terhadap kelapa sawit yang mengganggu keseimbangan lingkungannya karena deforestasi tidak dapat dihindarkan. Akhirnya muncullah keputusan Uni Eropa untuk membatasi masuknya kelapa sawit ke kawasan mereka. Isu ini mencapai puncaknya pada tahun 2017. Saat itu, Parlemen Uni Eropa meluncurkan "*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests*" dan pelarangan biodiesel dari kelapasawit. (Riady, Badarul, & Hi, 2023)

Hal-hal yang dilakukan Uni Eropa tersebut bertujuan untuk mengurangi penggunaan minyak sawit, termasuk kebijakan terkait



pembatasan penggunaan biodiesel dari minyak sawit. Salah satunya adalah Pengenalan *Renewable Energy Directive (RED)* oleh Uni Eropa bertujuan untuk mengurangi emisi karbon global untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar hayati yang kemudian menciptakan ketegangan antara UE dan Indonesia. Dalam kampanyenya Uni Eropa gencar menyoroiti masalah deforestasi, pernyataan minyak sawit tidak sehat, peyebab pemanasan global, korupsi, pekerja dibawah umur dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). (Wibowo, 2020) Perwujudan dari resolusi tersebut yaitu dengan langkah meminimalisir penggunaan minyak kelapasawit dimulai dari tahun 2017 dan diharapkan benar-benar berhenti di tahun 2030. Kebijakan pengurangan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar hayati sebagian besar didorong oleh upaya untuk mengurangi deforestasi dan emisi karbon yang disebabkan oleh pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Ini sesuai dengan komitmen Uni Eropa untuk mencapai target emisi karbon netral pada tahun 2050 (*2050 long-term strategy*). Berangkat dari semua itu, keinginan daripasar Uni Eropa selaku Konsumen adalah dalam produksinya, produk tidak mengandung unsur Pelanggaran HAM dan ramah lingkungan. Maka, untuk kelapa sawit sendiri, Uni Eropa menuntut adanya CSPO (*Certified Sustainable Palm Oil*) yang sesuai dengan standar RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*). Namun, langkah berani yang diambil oleh Uni Eropa ini dinilai sebagai diskriminatif oleh sebagian orang, karena bahan alternatif yang diusulkan oleh Uni Eropa dianggap kurang kompetitif. Indonesia juga menegaskan bahwa langkah Uni Eropa ini dapat membawa dampak negatif bagi perekonomian dan petani kelapa sawit di Indonesia. Dengan sebagian besar ekspor kelapa sawit Indonesia berlabuh di Uni Eropa, larangan tersebut dapat mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan ribuan petani kelapa sawit di Indonesia. Oleh karena



itu, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperjuangkan kepentingannya di forum internasional, termasuk melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Menurut Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Jerry Sambuaga menyebutkan bahwa isu lingkungan yang selalu masif disampaikan oleh oknum-oknum tertentu yang sudah menyentuh tangan anak-anak kecil dengan produk yang dilabeli *palm oil danger*. Menurut Jerry, yang menjadi alasan utama Uni Eropa menjegal produk kelapa sawit Indonesia semata-mata karena persaingan dagang saja. Uni Eropa memiliki produk yang bernama minyak nabati rapeseed yang menjadi pesaing utama dari CPO, akan tetapi jika dilihat dari segi harga, CPO lebih murah dibandingkan rapeseed. Sementara itu, Pada 12 Januari 2023, Malaysia melayangkan ancaman akan menyetop ekspor minyak sawit ke Eropa. Di Malaysia, Kelapa Sawit menyumbang sekitar 5% ekonomi negara dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mulai menjajaki beberapa pasar baru untuk mengimbangi kerugian terhadap penjualannya ke Eropa. Namun, beberapa perusahaan sawit Malaysia yang terdaftar secara publik terlanjur mendirikan kilang minyak di Eropa. Dalam hal ini, penting juga untuk memperhitungkan dampak sosial dari kebijakan UE tersebut. Terlepas dari pertimbangan lingkungan dan ekonomi, kebijakan ini juga dapat memiliki konsekuensi sosial yang signifikan bagi masyarakat yang bergantung pada industri kelapa sawit untuk mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan yang baik antara perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan sosial dalam merumuskan kebijakan terkait penggunaan minyak kelapa sawit.

### 3.2 Analisis Hasil

Interpretasi dari analisis penelitian ini berbuah hasil bahwa terjadi beberapa hal yang menjadi sorotan, diantaranya:



- a. Ketegangan antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia Keputusan UE untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar hayati pada tahun 2030 telah menciptakan ketegangan diplomatik antara UE dan Indonesia. Hal ini mengisyaratkan konflik kepentingan antara negara-negara produsen kelapa sawit dan UE yang memiliki kekhawatiran akan dampak lingkungan dari produksi kelapa sawit.
- b. Protes Indonesia terhadap kebijakan UE mencerminkan ketidakpuasan atas aspek ekonomi dan lingkungan dari keputusan tersebut. Indonesia melihat kebijakan tersebut sebagai diskriminatif karena bahan alternatif yang diusulkan oleh UE dianggap tidak kompetitif. Selain itu, Indonesia juga menyoroti manfaat ekonomi dari industri kelapa sawit dan kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa negara.
- c. Kebijakan UE untuk mengurangi penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar hayati sebagian besar didorong oleh kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dari industri kelapa sawit, termasuk deforestasi dan emisi karbon. Hal ini mencerminkan komitmen UE dalam menghadapi perubahan iklim global dan pencapaian target emisi karbon netral pada tahun 2050.
- d. Indonesia mengkhawatirkan dampak negatif terhadap perekonomian dan petani kelapa sawit di negara tersebut akibat kebijakan UE. Sebagian besar ekspor kelapa sawit Indonesia menuju UE, sehingga larangan tersebut dapat mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan ribuan petani kelapa sawit di Indonesia.
- e. Langkah diplomatik Pemerintah kedua negara dalam hal membawa kebijakan UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk memperjuangkan kepentingannya. Ini



mencerminkan upaya Indonesia dalam melindungi industri kelapa sawit dan memastikan keberlanjutan ekonomi negara.

- f. Pentingnya memperhitungkan dampak sosial dari kebijakan UE juga diperjelas, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada industri kelapa sawit untuk mata pencaharian mereka. Perlu adanya keseimbangan yang baik antara perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan sosial dalam merumuskan kebijakan terkait penggunaan minyak kelapa sawit.

### 3.3 Diskusi

Diskusi mengenai kebijakan Uni Eropa (UE) untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar hayati pada tahun 2030 mencerminkan kompleksitas isu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang terkait. Keputusan tersebut telah menimbulkan ketegangan yang signifikan antara UE dengan Indonesia dan Malaysia, dua negara produsen utama minyak kelapa sawit di dunia, yang merasa langkah ini sebagai tindakan diskriminatif. Perselisihan ini menyoroti perbedaan persepsi antara UE dengan kedua negara produsen mengenai keberlanjutan lingkungan, alternatif bahan bakar hayati, dan implikasi ekonomi serta sosial yang terkait dengan larangan tersebut.

Pada satu sisi, UE mengutamakan perlindungan lingkungan dan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sejalan dengan target ambisiusnya untuk mencapai emisi karbon netral pada tahun 2050. Langkah UE untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dilihat sebagai respons terhadap masalah deforestasi dan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan produksi kelapa sawit di negara-negara produsen. Terlepas dari manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit, UE menekankan pentingnya berpindah ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan guna mendukung tujuan global dalam mengatasi perubahan iklim dan



melindungi keanekaragaman hayati.

Di sisi lain, Indonesia dan Malaysia menghadapi dampak ekonomi yang signifikan akibat larangan tersebut, terutama bagi petani kelapa sawit dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Sebagai dua produsen utama, sebagian besar ekspor kelapa sawit dari kedua negara ini menuju UE, sehingga larangan tersebut berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan ribuan petani kelapa sawit serta masyarakat lokal yang bergantung pada industri tersebut. Pemerintah di kedua negara merasa bahwa larangan UE mencerminkan proteksionisme yang tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga dapat menghambat upaya pembangunan nasional.

#### **4. Strategi Kerja Sama**

##### **4.1 Strategi yang Telah Dilakukan**

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara produsen terbesar dunia yang merupakan penyumbang 85% ekspor minyak sawit dunia telah mengajukan gugatan secara terpisah terhadap Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) (2021) Malaysia melayangkan gugatannya terhadap langkah Uni Eropa pada 15 Januari 2021 dan Indonesia telah melakukannya lebih dulu pada Desember 2019. Kedua negara telah sepakat untuk melakukan misi bersama ke Uni Eropa dalam rangka melawan kebijakan yang mempersulit masuknya produk minyak kelapa sawit ke pasar Uni Eropa. Salah satunya dengan pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, dan Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia, Dato' Sri Fadillah Yusof (2023). Tujuan dari misi bersama ini adalah untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang merugikan terhadap sektor kelapa sawit akibat dari undang-undang larangan impor produk yang terkait dengan deforestasi yang disahkan oleh Uni Eropa pada tahun 2022. Selain itu, kedua negara juga sepakat



untuk mencari kemungkinan kolaboratif pendekatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, serta untuk terus terlibat dengan Uni Eropa melalui Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC) dalam mencari hasil yang menguntungkan bagi negara produsen dan konsumen.

#### **4.2 Rekomendasi Strategi: Saran strategi berdasarkan analisis penelitian.**

Langkah gugatan terhadap WTO yang dilakukan oleh kedua negara secara terpisah sudah sangat baik. Akan tetapi, kedua negara juga dapat membuka saluran komunikasi yang kuat, untuk mencari solusi bersama yang mempromosikan keberlanjutan industri kelapa sawit sambil memenuhi standar dan regulasi Uni Eropa, jika hal yang dikhawatirkan Uni Eropa mengenai isu lingkungan itu benar adanya dan isu yang masif digaungkan oleh mereka bukan hanya bermaksud persaingan dagang saja. Namun, sebagai pelontar syarat Uni Eropa juga harus menyanggupi terhadap kenaikan harga minyak sawit karena penambahan biaya produksi yang memenuhstandar Uni Eropa. Selain itu, Kerja sama regional juga dapat menjadi kunci, Indonesia-Malaysia dapat mencari dan mendapatkan dukungan dari negara-negara ASEAN dan regional lainnya Indonesia dan Malaysia memiliki peluang untuk mengubah dinamika konflik dengan Uni Eropa menjadi kesempatan untuk memperkuat industri kelapa sawit mereka dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan komitmen kuat dan kerja sama yang baik, mereka dapat menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Indonesia dan Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan dalam industri kelapa sawit mereka, meskipun implementasinya mungkin belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Kedua negara terus berusaha untuk memperbaiki praktik industri mereka dan meningkatkan keberlanjutan, termasuk dalam





menjawab kekhawatiran Uni Eropa terkait dampak lingkungan dari produksi kelapa sawit. Langkah-langkah ini merupakan langkah awal yang penting menuju penyelesaian konflik dengan Uni Eropa dan memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit di masa depan, tidak hanya untuk pasar Uni Eropa tetapi juga untuk pasar-pasar baru Indonesia-Malaysia dalam industri kelapa sawit di masa depan.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye hitam Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit telah menciptakan ketegangan ekonomi dan diplomatik antara Uni Eropa dengan Indonesia dan Malaysia. Larangan atau pembatasan penggunaan minyak sawit oleh Uni Eropa dapat mengancam stabilitas ekonomi kedua negara serta mengurangi pendapatan dari industri kelapa sawit. Namun, respons dari Indonesia dan Malaysia melalui langkah-langkah diplomasi dan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Sementara itu, untuk mengatasi tantangan ini, kedua negara dapat terus memperkuat kerja sama bilateral dalam mencari solusi bersama yang mempromosikan keberlanjutan industri kelapa sawit sambil memenuhi standar dan regulasi Uni Eropa. Selain itu, kerja sama regional juga dapat menjadi kunci, dengan mencari dukungan dari negara-negara ASEAN dan pemangku kepentingan lainnya untuk membela kepentingan bersama dalam perdagangan minyak kelapa sawit.

### **5.2 Saran**

Saran untuk jurnal terkait penelitian ini adalah untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap dampak ekonomi dan lingkungan dari kampanye hitam Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit. Studi ini dapat memperluas analisis terhadap respon



diplomasi dari Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa secara lebih rinci, serta mengikutsertakan perspektif pihak ketiga seperti organisasi non-pemerintah, ahli lingkungan, dan komunitas lokal yang terpengaruh. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengembangkan model keberlanjutan untuk industri kelapa sawit yang memperhitungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menambahkan kajian perbandingan dengan kasus kampanye serupa terhadap komoditas lainnya juga akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perdagangan internasional dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan lingkungan.



## Daftar Pustaka

- 2050 Long-Term Strategy*. (N.D.). Retrieved April 14, 2024, From An Official Eu Website: [Http://Climate.Ec.Europa.Eu/Eu-Action/Climate-Strategies-Target/2050-Long-Term-Strategi\\_En](http://Climate.Ec.Europa.Eu/Eu-Action/Climate-Strategies-Target/2050-Long-Term-Strategi_En)
- Bps. (2018). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Dewi, R. (2012). Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa. *Jurnal Interdependence*, 1, 150.
- Gunawan, S. (2018). Motivasi Indonesia Bekerjasama Dengan Malaysia Dalam Membentuk The Council Of Palm Oil Producing Countries (Cpopc) Tahun 2015. *Jurusan Ilmu Hubungan Internasional*, 2.
- Jan Horas V. Purba, T. S. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 43, 82.
- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute*. (2023, Februari 14). Retrieved April 5, 2024, From Prediksi Harga Minyak Sawit 2023, Apakah Anda Tahu ?: [Https://Palmoilina.Asia/Berita-Sawit/Kebun-Sawit-Seperti-Hutan/](https://Palmoilina.Asia/Berita-Sawit/Kebun-Sawit-Seperti-Hutan/)
- Riady, C., Badarul, K., & Hi, H. (2023). Analisis Upaya Indonesia Dalam Melawan Black Campaign Minyak Kelapa Sawit Dari Uni Eropa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 56.
- Taher, A. P. (2021, Februari 5). *Indonesia-Malaysia Sepakat Lawan Uni Eropa & Australia Soal Sawit*. Retrieved April 11, 2024, From Tirto Id:



<https://tirto.id/Indonesia-Malaysia-Sepakat-Lawan-Uni-Eropa-Australia-Soal-Sawit-F92e>

Uly, Y. A. (2023, 29). *Indonesia Dan Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit Oleh Uni Eropa*. Retrieved 4 11, 2024, From Kompas:

<https://money.kompas.com/read/2023/02/09/173300226/Indonesia-Dan-Malaysia-Sepakat-Lawan-Diskriminasi-Sawit-Oleh-Uni-Eropa-#:~:Text=Jakarta%2c%20kompas.Com%20-%20indonesia%20dan%20malaysia%20sepakat%20melakukan,Kelapa%20sawit%20%28crude%20palm%20oil%20%2fc>

Wibowo, M. I. (2020). *Analisis Dampak Black Campaign Terhadap Eksistensi Kelapa Sawit Indonesia*. Medan: Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian.

